



PAJAK DAERAH

Pemutihan PBB Mulai Diusulkan

UMBULHARJO—Banyaknya wajib pajak (WP) yang mengajukan keringanan untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) direspons oleh Pemkot Jogja. Salah satunya adalah rencana pengusulan pemutihan.

Abdul Hamid Razak
hamied@harianjogja.com

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jogja Kadri Renggono mengatakan usulan pemutihan tersebut hanya diberlakukan untuk tunggakan PBB pada 1994 yang WP-nya tidak dapat ditemukan. Usulan pemutihan itu, kata dia, bertujuan mengurangi tunggakan PBB yang saat ini berjumlah sekitar Rp50 miliar.

Kadri mengatakan total tunggakan itu termasuk akumulasi dari tunggakan wajib pajak ketika PBB ditangani Kantor Pajak Pratama (KPP) Jogja yang nilainya sekitar Rp34 miliar. "Kami akan mengusulkan pemutihan atau penghapusan tunggakan PBB itu. Kami akan telaah dan cermati lagi data-datanya. Kebanyakan tunggakan PBB tahun-tahun lama seperti pada 1994," kata Sabtu (12/5).

Dia mengatakan penghapusan tunggakan itu harus dilakukan secara prosedural. Terdapat beberapa kriteria tunggakan yang bisa dihapus. Misalnya keberadaan WP sudah tidak terdata dan tidak ditemukan.

- Usulan pemutihan PBB bertujuan mengurangi tunggakan PBB yang saat ini mencapai Rp50 miliar.
- Usulan penghapusan tunggakan mengacu pada Perwal No.19/2015 tentang Penghapusan Piutang Daerah.

Peralihan objek pajak dilakukan berkali-kali sehingga sulit untuk melacaknya. Selain itu, mekanisme penghapusan PBB diusulkan terlebih dulu ke walikota. Jika disetujui maka tunggakan tersebut akan dihapus.

Usulan penghapusan tunggakan tersebut diakulnya mengacu pada Peraturan Wali Kota (Perwal) No.19/2015 tentang Penghapusan Piutang Daerah. Perwal itu mengatur tata cara penghapusan piutang daerah untuk semua jenis piutang yang menjadi kewenangan daerah meliputi kewajiban pokok pajak, pokok retribusi, pokok piutang lainnya, bunga dan/atau denda administrasi yang tertunggak, sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang.

Kendati berpayung hukum, penghapusan tunggakan PBB itu tetap menerapkan prinsip kehati-hatian. "Kalau dari pencermatan kami, ada sekitar 35 WP PBB yang akan diusulkan dihapus tunggakannya tahun ini. Nilai tunggakannya mencapai Rp50 juta. Nilainya memang tidak signifikan, tetapi itu bisa mengurangi total tunggakan," katanya.

PBB KOTA JOGJA dalam Angka

- 93.938 lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB yang dibagikan tahun ini.
- Rp85,4 miliar Nilai total ketetapan pajak.
- Rp69,5 miliar Target realisasi PBB tahun ini.
- Realisasi PBB (2017) Rp 79,9 miliar (119%).
- Tunggakan PBB (1994-2017) Rp 50 miliar

Ditulah dari berbagai sumber

Instansi	Nilai Berita

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 September 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005